

SEKAPUR SIRIH

Laporan HAM ini disusun oleh anggota-anggota Badan Pekerja KontraS di Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Papua dan Sulawesi. Masing-masing membuat laporan atas situasi HAM dalam wilayahnya dan dirangkum dalam satu laporan utuh. Penyusunan laporan ini melalui proses yang panjang. Penyiapan bahan-bahan dan penulisan draft awal dilakukan oleh seluruh anggota badan pekerja di KontraS Jakarta, serta Asiah Uzia, Hendra Fadli, Dedy Saputra ZN di KontraS Aceh, Oslan Purba, Diah Susilowati, Herdensi Adnin di KontraS Sumatera Utara, Pieter Ell, Harry dan Willy di KontraS Papua serta Edmond dan Nasrun di KontraS Sulawesi. Penyuntingan akhir dilakukan oleh Edwin Partogi, Haris Azhar, Indria Fernida, Mouvty Makaarim, Papang Hidayat, Sri Suparyati dan Usman Hamid.

Laporan HAM ini diterbitkan KontraS secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja-kerja KontraS dalam mengawal proses demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Penyusunan tak dapat memenuhi penulisan yang utuh terhadap situasi dan kondisi HAM di tanah air, namun sebagian isi buku merupakan pelaporan kerja advokasi KontraS sepanjang tahun 2006.

Metodologi penyusunan laporan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui investigasi lapangan, diskusi dengan kelompok korban dan jaringan, pemantauan media dan dokumentasi atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi serta perkembangan kebijakan dalam reformasi institusi dan legislasi.

KontraS menyadari bahwa perjuangan melawan politik kekerasan, ketakutan dan penindasan tak dapat dilakukan sendirian. Berbagai pencatatan atas kerja KontraS adalah refleksi perhatian dan solidaritas dari kelompok korban, rekan-rekan jaringan di hampir seluruh wilayah Indonesia serta pers. Oleh karenanya KontraS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusunan laporan HAM tahunan dan dalam perjuangan mengakhiri impunitas di negeri ini.

Semoga catatan atas keadaan HAM ini dapat menjadi cermin bagi pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan tanggungjawab negara kepada rakyatnya dan menjadi pelajaran bagi kita sebagai bagian masyarakat sipil, khususnya korban pelanggaran HAM untuk terus membangun harapan dan berjuang dalam merebut keadilan.

Medio Agustus 2007



DAFTAR ISI

	Hal
Sekapur Sirih	i
Daftar Tabel	ix
Indeks Singkatan	xiii
I KILAS BALIK POLITIK HAM 2006	1
A Dinamika Politik Nasional	1
A.1. Impunitas dan Redupnya Wibawa Hukum Negara	2
A.2. Konflik dan Perdamaian	5
A.3. Lintasan Peristiwa Kekerasan	8
A.4. Reformasi Institusi dan Legislasi	13
A.4.1. TNI Otonom dari Kontrol Politik dan Hukum	13
A.4.2. Polri Masih Sulit Meraih Kepercayaan	14
A.4.3. Badan Intelijen Belum Berubah	15
A.4.4. Produk Reformasi Penopang HAM diserang	16
A.5. Kesimpulan dan Rekomendasi	18
B Diplomasi Internasional HAM RI	19
B.1. Indonesia Resmi menjadi Negara Pihak Pada Kovenan Induk Kembar	20
B.2. Instrumen HAM yang Belum Diratifikasi Pemerintah RI	24
B.3. Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindak Penghilangan Secara Paksa	26
B.3.1. Pentingnya Konvensi Anti Penghilangan Paksa	27
B.4. Badan HAM PBB Baru; <i>UN Human Rights Council</i>	31
B.4.1. RI dan Dewan HAM PBB (<i>UN Human Rights Council</i>)	35
B.4.2. Kritik Akhir Tahun terhadap <i>Human Rights Council</i>	38
B.5. Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB	39
B.6. Membangun Mekanisme HAM Regional ASEAN	39
B.7. ICC dan NSA: Keadilan versus Impunitas	41
II SULITNYA MENGAKHIRI IMPUNITAS	43
A Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS)	43
A.1. Deklarasi GEMAS	44
A.2. Resolusi Korban Pelanggaran HAM	46
A.3. Praperadilan SKP3 Soeharto	53
A.3.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: SKP3 Soeharto Tidak Sah	56
A.3.2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta: SKP3 Soeharto Sah	57

B	Trisakti, Semanggi I dan II: Pingpong DPR Tak Berkesudahan	58
B.1	Plintat Plintut Pimpinan DPR	58
B.1.1	Pembatalan Pertama, Rapat Paripurna 12 Januari 2006	59
B.1.2	Pembatalan Kedua, Rapat Badan Musyawarah, 19 Januari 2006	60
B.1.3	Pembatalan Ketiga, Rapat Pimpinan, 27 Januari 2006	63
B.1.4	Pembatalan Keempat, Rapat Badan Musyawarah, 12 Februari 2006 ...	63
B.1.5	Pembatalan/Penyimpangan Kelima, Rapat Badan Musyawarah, 23 Februari 2006	66
B.1.6	Pembatalan/Penyimpangan Keenam, Rapat Badan Musyawarah, 20 Juni 2006	66
B.2	Politisasi DPR untuk TSS	67
B.3	Kejaksaan Agung Tetap Tak Mau Sidik	69
B.4	Jangan Diam, Lawan Pengingkaran!	70
B.5	Kooptasi Militer atas Supremasi Sipil	72
C	Kasus Penculikan Aktivis 1997/1998: Liku Sulit Penyelidikan Komnas HAM .	73
C.1.	Komnas HAM Minim Transparansi	74
C.2	TNI, Jaksa Agung, dan Pengadilan Negeri Setali Tiga Uang	77
C.3	Hasil Penyelidikan <i>Pro Justicia</i>	79
C.4	Kembali, Jaksa Agung Tolak Menyidik	81
C.5	Presiden Diam	82
D	Tragedi Mei 1998: Masih Dihadang Kejaksaan Agung	83
D.1	Penolakan Negara	83
D.2	Tak Lelah Membangun Ingatan	84
E	Talangsari 1989: Penyelidikan Komnas HAM tak Tuntas, Teror tak Henti	85
E.1	Janji-Janji Komnas HAM yang Terus Ditunda	86
E.2	Dukungan DPR, DPRD, dan Parpol	88
E.3	Galang Solidaritas dan Dukungan Ormas	90
E.4	Intimidasi dan Teror Terus Berlangsung	90
F	Tanjung Priok 1984: Pengadilan Tanpa/Minus Keadilan	93
F.1	Tembok Tebal Pengadilan	93
F.2	Absennya Pemenuhan Hak Korban	96
F.3	Perjuangan Panjang	97
G	Timor Leste, Masih Jadi Masalah	100
G.1	Konflik Perbatasan Laporan CAVR	100
G.2	Konflik Internal	101
G.3	Satu Tahun Komisi Kebenaran dan Persahabatan	103
H	Kasus Munir: Keadilan versus Kepastian Hukum	104
H.1	Mengadili Satu Orang	105
H.2	Manuver Muchdi PR	108
H.3	Putusan Pengadilan Tinggi; Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri	109

H.4	Mengangkat Isu <i>Human Rights Defender</i>	110
H.5	BIN Melobi Parlemen AS untuk Kasus Munir	112
H.6	Menggugat PT Garuda	114
H.7	Uni Eropa Mempertanyakan SBY Soal Kasus Munir	115
H.8	Pollycarpus Bebas!	116
H.9	Respon Internasional (Masih) Kuat	117
H.10	Keadilan Harus Mengatasi Hukum Prosedural	119

III KONFLIK DAN PERDAMAIAN; KONDISI HAM DI ACEH, POSO, DAN PAPUA

A	Aceh : Merajut Damai Dan Keadilan	125
A.1	UUPA sebagai Konstitusionalitas Aceh Masa Depan	125
A.2	Isu Negatif tentang GAM	129
A.3	MoU Masih Dimasalahkan	130
A.4	Pasal-Pasal Dipermasalahan/Problematika Pasal-pasal HAM	131
A.4.1	Pasal-Pasal HAM; Pengadilan HAM dan KKR	132
A.4.2	Pasal tentang TNI	135
A.4.3	Pasal tentang Calon Independen	138
A.4.4	Pasal tentang Partai Lokal	139
A.4.5	Istilah Pemerintahan Aceh	140
A.4.6	Batas Wilayah	142
A.4.7	Pengangkatan Kapolda dan Kepala Kejaksaan Aceh	142
A.4.8	Tenaga Kerja	143
A.4.9	Isu Perempuan	143
A.4.10	Pasal-Pasal Lainnya	143
A.5	Pengesahan UU Pemerintahan Aceh	143
A.6	Kilas Balik Implementasi MoU Helsinki	144
A.6.1	<i>Decommissioning</i> dan Demobilisasi	145
A.6.2	Penegakan Hukum Dan Keamanan	148
A.6.3	Proses Reintegrasi dan Penanganan Korban Konflik	150
A.6.4	Tugas Badan Rehabilitasi Aceh/BRA	150
A.6.5	Sasaran Re-integrasi: (GAM, Korban Konflik, dan Milisi)	151
A.6.6	Respon Publik Terhadap BRA	152
A.6.7	Tindak Kekerasan Masih Terjadi, Tindak Kriminalitas Meningkat	155
A.6.8	Perampasan terhadap Hak Berserikat, Berekspresi, dan Hak untuk Tidak Diintimidasi	158
A.6.9	Perampasan Hak Hidup	158
A.6.10	Penyiksaan	160
A.6.11	Penangkapan Sewenang-Wenang	160
A.7	Maraknya Aksi Penggalian Kuburan Korban Konflik	161

A.7.1	Menjalankan Agama, Menghilangkan Barang Bukti	162
A.7.2	Respon terhadap Pembongkaran Kuburan	163
A.8	Kontroversi Seputar Penerapan Syariat Islam Aceh	168
A.8.1	Polemik rancangan Qanun Pencurian Potong Tangan	169
B	Papua Menanti Elit Berubah : Profesionalisme Aparat untuk Melindungi HAM Kembali Diuji	171
B.1	Kekerasan dan Impunitas	171
B.1.1	Obet Kossy Tewas Dikeroyok 3 Orang Anggota Polisi	171
B.1.2	Lagi-Lagi Ada yang Tertembak di Waghete	173
B.1.3	Insiden Abepura 16 Maret 2006	175
B.1.4	Pistol Menyalak, Johanis Kurisi Terkapar	180
B.1.5	ALDP, ELSHAM, LBH dan KontraS Papua Menggugat	184
B.2	Freeport, Bisnis, dan Kekerasan	186
B.3	Paradigma Lama Elit Kekuasaan	191
B.3.1	Menyikapi OPM	191
B.3.2	Menyikapi Suaka Politik dan Politik Menyalahkan 'Yang Lain'	192
B.3.3	Menyikapi Pelaksanaan Otsus	193
C	Kekerasan di Poso dan Palu : Kegagalan Negara Yang Terpelihara.....	193
C.1	Kilas Balik Upaya Negara Merespon Kekerasan	194
C.2	Ternyata, Kekerasan Belum Berhenti Di Poso	198
C.3	Bom dan Kekerasan yang Tetap Hidup di Poso	202
C.4	Pelatihan Militer Di Wilayah Poso	203
C.5	Salah Tangkap Atas Dalih Terorisme	204
C.6	Tuntutan Evaluasi Koopskam	205
C.7	Satu Tahun Bom di Tentena	206
C.8	Eksekusi Mati Fabianus Tibo Cs	207
C.9	Penembakan Pendeta Irianto Kongkoli	208
C.10	Bentrokan Di Malam Lebaran	209
C.11	Polri Menetapkan 29 DPO (Daftar Pencarian Orang)	211
IV	LINTASAN PERISTIWA KEKERASAN 2006	215
A	Kekerasan Berbasis Masalah Struktural	215
A.1	Penculikan terhadap Petani Veteran di Kalimantan Timur	215
A.2	Kekerasan terhadap Nelayan Bengkalis di Riau	216
A.3	Penangkapan Sewenang-wenang kepada Petani Dompu di NTB	218
A.4	Penangkapan dan Pemukulan kepada Petani Tanah Awu di NTB	219
A.5	Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang terhadap Petani Kontu- Muna di Sultra	220
B	Praktek Kekerasan Konvensional oleh Aparat Negara	221
B.1	Penyiksaan oleh Aparat Polres Belu	221

B.2	Penyiksaan dan Intimidasi oleh Aparat Polsek Jatiasih Bekasi	223
B.3	Penyiksaan oleh Aparat Polsek Cileduk	224
B.4	Penyiksaan oleh Aparat LP Garut	224
B.5	Penembakan, Penahanan Sewenang-wenang oleh Aparat Polsek Bangsalsari ...	226
B.6	Penembakan dan Penangkapan Sewenang-wenang oleh Aparat Polres Bolaang Mongondow	227
B.7	Penangkapan Sewenang-wenang oleh Aparat Satpol PP DKI Jakarta	228
B.8	Pemukulan dan Penganiayaan oleh Aparat Satpol PP Kota Madya Medan	229
B.9	Pemukulan oleh Satpam BIN	230
B.10	Penembakan oleh Aparat TNI Kodam Brawijaya	230
B.11	Penembakan oleh Aparat Polres Jakarta Utara	231
B.12	Pemukulan oleh Aparat TNI AL	232
C	Kekerasan terhadap Aktivistis dan Hak Atas Kebebasan Berekspresi & Berkeyakinan	233
C.1	Ancaman dan Intimidasi terhadap Aktivistis Solidamor	233
C.2	Penculikan dan Intimidasi terhadap Aktivistis Forum Peduli Nurani Rakyat Sulit Air	235
C.3	Pembunuhan terhadap Korban Sengketa Kebun Sawit di Sumatera Utara	236
C.4	Pemukulan Jurnalis oleh Satpam UPN Veteran Jawa Timur	237
C.5	Tindak Kekerasan di Kampus IKIP Mataram	238
C.6	Pembubaran Peringatan Hari HAM dan Anti <i>Trafficking</i> di Surabaya	239
C.7	Pembubaran Diskusi Filsafat Sosial dan Ekonomi di Bandung	240
C.8	Kekerasan terhadap Ahmadiyah (Bulukumba dan Mataram)	242
D	Pelanggaran atas Prinsip <i>Fair Trial</i>	244
D.1	Penahanan Anak di Bawah Umur	244
D.2	Ketidaknetralan Aparat atas Kasus Zubaedah	246
E	Gambaran Situasi HAM di Sumatera Utara	247
E.1	Kekerasan Negara Semakin Subur	250
E.1.1	Kekerasan oleh Polisi	250
E.1.2	Kekerasan Satuan Polisi Pamong Praja	253
E.1.3	Kekerasan oleh Aparat TNI	255
E.1.4	Problem Institusi Peradilan	256
E.2	Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Pembela HAM (<i>Human Rights Devender</i>)	257
E.2.1	Penembakan dan Pemenjaraan Terhadap Syamsir Siregar Koordinator Rayon Organisasi Buruh FSBSI 1992	257
E.2.2	Penangkapan dan Pemenjaraan Khairulsyah (Ketua Gerakan Masyarakat Medan Maimun Bersatu Yang Melakukan Penolakan Aktivitas PT. Eka Kesuma Wijaya yang Melakukan Penimbunan DAS, Pelurusan Sungai Deli)	259
E.2.3	Ancaman dan Intimidasi Terhadap Jaya Arjuna (Direktur TII Suma-	

	tera Utara dan Dosen Fakultas Tehnik USU terkait isu Korupsi di USU)	260
E.2.4	Teror dan Intimidasi Terhadap Edy Ikhsan, SH, MA. (Direktur Pusa-ka Indonesia)	261
V	REFORMASI REGULASI DAN INSTITUSI; KETIKA BIDUK KEHILANGAN ARAH	263
A	Mengintip Reformasi TNI	263
A.1	Pragmatisme Elite Sipil Dalam Reformasi Militer Hambat HAM	266
A.2	Politisasi Jabatan Panglima TNI	267
A.3	Dilema Hak Pilih TNI	268
A.4	Kekerasan dan Kriminalitas	272
A.5	Lambatnya Penghapusan Bisnis Militer	274
A.6	RUU Peradilan Militer	277
A.7	Proyeksi Reformasi TNI 2007	281
B	Menuju Polisi Profesional yang Dipercaya Masyarakat	282
B.1	Perubahan Lingkungan Eksternal	283
B.2	Kinerja Polri Belum Berubah	284
B.3	Penting untuk Memberi Batas Baru bagi Peran dan Fungsi Kepolisian	288
B.4	Penyakit Menahun yang Masih Melekat pada Peran Polri.....	290
B.5	Terorisme: Asal Tangkap dan Asal-asalan Tangkap	293
C	Aborsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	297
C.1	Uji Materiil UU KKR	299
C.2	Keterangan Saksi Ahli: Pemenuhan Hak Korban Mutlak	301
C.3	Permohonan Susulan dari Mereka yang Menjadi “Korban Komunis”	304
C.4	Putusan MK: UU KKR Dibatalkan	304
C.5	Respon terhadap Putusan MK	309
C.6	Respon Pemerintah yang Retoris	311
D	Kebebasan Informasi vs Rahasia Negara dan Intelejen	312
D.1	RUU Kebebasan Memperoleh Informasi	313
D.2	RUU Rahasia Negara	315
D.3	RUU Intelejen	317
D.4	Perlindungan Saksi dan Korban: Komitmen Tanpa Kejelasan	318
E	Gambaran Umum Praktek Hukuman Mati	320
E.1	Eksekusi Tibo, Da Silva, dan Riwu	330
E.2	Peringatan Hari Anti Hukuman Mati Sedunia; 10 Oktober 2006	332
E.3	Hukuman Mati dalam Rancangan Hukum Pidana Baru	332
E.4	Kecenderungan Global akan Praktek Hukuman Mati	335
E.5	ADPAN; Membentuk Koalisi Regional Menghapus Hukuman Mati	345
E.6	Masih Terdapat Kemunduran; Eksekusi Saddam Hussein	345

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
I.1	Kekerasan Penggusuran Satpol PP (2006)	9
I.2	Pernyataan dan Aksi Kekerasan atas nama Bahaya Komunis.....	10
I.3	Instrumen HAM Utama Internasional yang Diratifikasi Pemerintah RI	21
I.4	Status Deklarasi dan Reservasi Pemerintah RI dalam Mekanisme <i>Treaty Bodies</i>	22
I.5	Instrumen HAM Utama Internasional yang Belum Diratifikasi Pemerintah RI	24
I.6	Hal-hal penting yang diatur dalam Konvensi Anti Penghilangan Paksa	29
I.7	Perbandingan antara Komisi HAM dengan Dewan HAM	32
I.8	Daftar Anggota Dewan HAM PBB (47 Negara)	34
I.9	Perbandingan Negara-Negara ASEAN di Bidang HAM	40
	Deklarasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto	44
	Resolusi Korban Pelanggaran HAM Indonesia Atas Kejahatan Rezim Soeharto	47
II.1	Kasus-Kasus Pelanggaran Berat HAM di Masa Orde Baru/Soeharto (1966-1998) . 41 Tahun Tragedi 1965; Korban Terus Menuntut Negara Mengungkap Sejarah Gelap & Menegakan HAM	49 51
II.2	Fakta-fakta Hukum Pemohon Praperadilan SKP3 Soeharto	53
II.3	Pingpong DPR dalam Berbagai Mekanisme Internalnya bagi Pembahasan Pencabutan Rekomendasi Pansus DPR (1999-2004)	58
II.4	Surat Keluarga Korban dan KontraS kepada Bamus DPR.....	61
II.5	Intimidasi kepada Korban dan Aktivistis Kasus Talangsari 1999-2006	90
II.6	Dinamika Kasus Munir di Tahun 2006	120
III.1	Kelompok Milisi di Aceh	145
III.2	Penyaluran Dana Bantuan BRA Tahap II tahun 2006	154
III.3	Kekerasan Di Aceh (2006)	156
III.4	Tindak Kriminalitas Menggunakan Senjata Api (2006)	157
III.5	Penggalian Kuburan Korban Konflik Aceh (2006)	164
III.6	Penangkapan yang Dilakukan Warga atas Nama Syariat (April - Desember 2006) ...	170
III.7	Korban Kasus Waghete	174
III.8	Pelaku Kasus Waghete	174

III.9	Korban di Pihak Aparat Negara	175
III.10	Korban di Pihak Warga Sipil/Mahasiswa	176
III.11	Data Korban Penyisiran	177
III.12	Data Kerusakan Asrama Akibat Penyisiran	178
III.13	Data Penghuni Asrama yang Disisir	180
III.14	Tindak Kekerasan Pasca Deklarasi Malino (2002-2006)	195
III.15	Kekerasan di Sulawesi Tengah pada Periode Januari – Maret 2006	202
III.16	Pemboman, Penemuan dan Ancaman Bom di Sulawesi Tengah(28 Mei 2005 – 28 Mei 2006)	206
	Kronologis Peculikan dan Intimidasi Kasus Kamzul Abrar	235
IV.1	Kekerasan Berdasarkan Pelaku Dan Lokasi Kejadian Di Sumatra Utara (2006)	249
IV.2	Kekerasan Berdasarkan Pelaku Di Sumatra Utara (2006)	250
IV.3	Kekerasan oleh Polisi di Sumatra Utara (2006)	251
IV.4	Perbandingan Kekerasan oleh Polisi di Sumatra Utara Pada 2005 dan 2006	252
IV.5	Kekerasan Satpol PP di Sumatra Utara (2006)	254
IV.6	Kekerasan TNI di Sumatra Utara (2006)	255
IV.7	Kriminalisasi Korban oleh Institusi Peradilan Di Sumatra Utara (2006)	257
IV.8	Kekerasan terhadap Para Pembela HAM (<i>HRD</i>) Berdasarkan Pelaku (2006)	261
V.1	Pandangan Mendukung Hak Pilih TNI	268
V.2	Pandangan Menolak Hak Pilih TNI	269
V.3	Pendapat Berbagai Fraksi DPR	272
V.4	Anggota TNI dalam Catatan Kriminalitas 2006	273
V.5	Alasan Penolakan Prajurit TNI Diadili di Pengadilan Umum	278
V.6	Kinerja Polri, Kekerasan dan Penegakan Hukum 2005 - 2006	286
V.7	Daftar Penangkapan Tersangka Teroris	294
V.8	Materi <i>Judicial Review</i> Terhadap UU No 27/2004 Tentang KKR	302
V.9	Mereka yang Sudah Dieksekusi (Hingga 2006)	321
V.10	Mereka yang Terancam Dieksekusi di Indonesia (Total 121 Orang)	324
V.11	Perundang-undangan RI yang Memiliki Ancaman Pidana Hukuman Mati	334
V.12	Praktek Hukuman Mati di Dunia	336
V.13	Negara-Negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Semua Jenis Kejahatan (Tidak Menyediakan Hukuman Mati bagi Semua Jenis Kejahatan) (Total 88 Negara)	337

V.14	Negara-Negara yang Menghapus Hukuman Mati untuk Kejahatan Biasa (Masih Menyediakan Hukuman Mati untuk Kejahatan Luar Biasa seperti Kejahatan Militer dalam Situasi Luar Biasa/ Perang) (Total 11 Negara)	339
V.15	Negara-Negara yang Tidak Melakukan Eksekusi Mati dalam 10 Tahun Terakhir atau Memiliki Komitmen Politik Tidak Melakukan Eksekusi (Total 29 Negara)	340
V.16	Negara-Negara yang Masih Menerapkan Hukuman Mati (Dalam Kurun Waktu 10 Tahun Masih Ada Eksekusi Mati) (Total 69 Negara)	341
V.17	Instrumen HAM Internasional dan Regional tentang Abolisi Hukuman Mati	344
V.18	Perkembangan Penting Penghapusan Hukuman Mati di Dunia	347



INDEKS SINGKATAN

A

ASEAN	: Association of South East Asian Nations
AFAD	: Asian Federation Enforced or Involuntary Disappearance
AS	: Amerika Serikat
ASPA	: American Servicemembers' Protection Act
AMM	: Aceh Monitoring Mission
AMPI	: Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia
ABDYA	: Aceh Barat Daya
AMPTI	: Asosisasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se Indonesia
ALDP	: Aliansi Demokrasi untuk Papua
AD	: Angkatan Darat
AU	: Angkatan Udara

B

BAMUS	: Badan Musyawarah
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BUSER	: Buru Sergap
BAP JPU	: Berita Acara Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BERANTAS	: Benteng Rakyat Anti Separatis
BRA	: Badan Reintegrasi Aceh
BIN	: Badan Intelijen Negara

C

CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women
CAT	: Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CRC	: Convention on the Rights of the Child
CERD	: Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CMW	: Committee on Migrant Workers
CAVR	: Commisao de Acqhimento Verdade e Reconsiliacao
CoE	: Commission of Experts

CICS	: Centre for Indonesian Communication
-------------	---------------------------------------

D

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DOM	: Daerah Operasi Militer
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPRA	: Dewan Pimpinan Rakyat Aceh
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang
DINSOS	: Dinas Sosial
DPO	: Daftar Pencarian Orang
DPD SPI	: Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pengacara Indonesia
Densus	: Detasemen Khusus
Dephan	: Departemen Pertahanan

E

ECOSOC	: Economic and Social Council
EPG	: Eminent Persons Group
EDA	: Excess Defense Articles
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah

F

FMF	: Foreign Military Financing
F-PG	: Fraksi Partai Golkar
F-PKB	: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
FAMSI	
ATMAJAYA	: Front Aksi Mahasiswa Semanggi
FDTL	: Forca Devesa de Timor Leste
FPARI	: Front Perlawanan Rakyat Aceh Republik Indonesia
FPSG	: Front Perlawanan Separatis GAM
Front TUM	: Front Perlawanan dan Pembela Rakyat Teuku Umar
FPMP	: Front Penyelamat Merah Putih
FAGSAM	: Front Anti Gerakan Separatis Aceh Merdeka
FPGMP	: Front Perlawanan Garuda Merah Putih

FM	: Freeport McMoRan
FMN: Front	: Mahasiswa Nasional Ciputat
FORMAK	: Forum Masyarakat Anti Komunis
FMP	: Forum Merah Putih
FAK	: Front Anti Komunis

G

GEMAS	: Gerakan Masyarakat Adili Soeharto
GOLKAR	: Golongan Karya
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
GAM	: Gabungan Aceh Merdeka
GPMP	: Gerakan Pemuda Merah Putih
GEURASA	: Gerakan Rakyat Anti Separatis Aceh
GPA-RI	: Gerakan Penyelamat Aceh Republik Indonesia
GPSG TP	: Gerakan Perlawanan Separatis GAM-Teuku Peukan
GPSG TCA	: Gerakan Perlawanan Separatis GAM Teuku Cut Ali

H

HAM	: Hak Asasi Manusia
HRWG	: Human Rights Working Group

I

ICESCR	: International Covenant on Economic Social and Cultural Rights
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICERD	: Indonesian Centre for Estate Crops Research and Development
ICJ	: International Court of Justice
ICRMW	: International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
ICC	: International Criminal Court
IKOHI	: Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia
IDP	: Internal Displaced Person
ICTY	: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
ICTR	: International Criminal Tribunal for Rwanda
IMET	: International Military Education and Training

ICW	: Indonesian Curoption Watch
IKKAPRI	: Ikatan Keluarga Korban Tanjung Priok
IMET	: International Military Education and Training
IKALUIN	: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ICEL	: Indonesian Center for Environmental Law
INCReS	: Institute for Culture and Religion Studies

J

JDA	: Jaringan Demokrasi Aceh
------------	---------------------------

K

KONTRAS	: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KOMPAK	: Komite Mahasiswa Pemuda Anti Kekerasan
KUHAP	: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
KPP HAM	: Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KWI	: Konferensi Wali Gereja Indonesia
KP3T	: Komisi Penyelidik dan Pemeriksaan Pelanggaran HAM Tanjung Priok
KKP	: Komisi Kebenaran dan Persahabatan
KKR	: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KPA	: Komite Peralihan Aceh
KADES	: Kepala Desa
Kapolda NAD	: Kepala Polisi Daerah Nangroe Aceh Darussalam
KADIS	: Kepala Dinas
Koopskam	: Komando Operasi Pemulihan Keamanan
KMB	: Keluarga Mahasiswa Bogor
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KMIP	: Kebebasan Memperoleh Informasi Publik
KPI	: Komisi Penyiaran Independen
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KY	: Komisi Yudisial
KON	: Komisi Ombudsman Nasional
Kompolnas	: Komisi Kepolisian Nasional
KPU	: Komisi Pemilihan Umum

L

LTTE	: Liberation Tigers of Tamil Eelam
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LAPANKRI	: Laskar Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
LMND	: Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi
LS-ADI	: Lingkar Studi-Aksi untuk Demokrasi Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LPS HAM	: Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi HAM
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan

M

Menlu	: Menteri Luar Negeri
Monas	: Monumen Nasional
MA	: Mahkamah Agung
MoU	: Memorandum of Understanding
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MRP	: Majelis Rakyat Papua
MUI	: Majelis Ulama Indonesia

N

NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NGO	: Non Governmental Organization
NSA	: Non-Surrender Agreement
NAD	: Nangroe Aceh Darussalam

O

OTSUS	: Otonomi Khusus
ORMAS	: Organisasi Masyarakat
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
Ornop	: Organisasi non Pemerintah

P

PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
------------	------------------------------

PBHI	: Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia
PANSUS	: Panitia Khusus
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PAN	: Partai Amanat Nasional
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PDS	: Partai Damai Sejahtera
PRESMA	
USAKTI	: Pres Mahasiswa Universitas Trisakti
PKZTL	: Paguyuban Korban dan Keluarga Korban Peristiwa Talangsari di Lampung
PKZTLS	: Paguyuban Korban dan Keluarga Korban Peristiwa Talangsari di Solo
PBNU	: Pengurus Besar Nahdatul Ulama
PP	
Muhammadiyah	: Pengurus Besar Muhamadiyah
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
POLDA	
LAMPUNG	: Polisi Daerah Lampung
PURN	: Purnawirawan
PNTL	: Polisi Nasional Timor Leste
PM	: Perdana Menteri
PPRMP	: Persatuan Perlawanan Rakyat Merah Putih
PNS	: Pegawai negeri Sipil
PRD	: Partai Rakyat Demokratik
POLSEK	: Polisi Sektor
PDMD	: Penguasa Darurat Militer Daerah
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
POLRES	: Polisi Resort
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
PHBM	: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
PPM	: Pemuda Panca Marga
PUSPOM	: Pusat Polisi Militer
PK	: Peninjauan Kembali
Petrus	: Penembakan Misterius
PKI	: Partai Komunis Indonesia

Q

R

RI : Republik Indonesia

RAN HAM : Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

RAPIM : Rapat Pimpinan

RUU-PA : Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh

RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah

Rapimnas : Rapat Pimpinan Nasional

RCTI : Rajawali Citra Republik Indonesia

RN : Rahasia Negara

S

SPDC : State Peace and Development Council

STSI : Sekolah Tinggi Seni Indonesia

SIRA : Sentral Informasi Referendum Aceh

SATGAS : Satuan Tugas

Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja

SNKB : Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan

SCTV : Surya Citra Televisi Indonesia

T

TSS : Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II

TNI : Tentara Nasional Indonesia

TGPF : Tim Gabungan Pencari Fakta

TAT : Tim Advokasi Talangsari

TOR : Term of Reference

TPPNK : Tim Pengawas Pelaksanaan Nota Kesepahaman

TNA : Tentara Nasional Aceh

TIMSUS : Tim Khusus

TNI AU : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

TKP : Tempat Kejadian Perkara

TPF : Tim Pencari Fakta

TPNT : Tim Pembela Nelayan Tertindas

TAP MPR : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

TPI : Televisi Pendidikan Indonesia

U

UU : Undang Undang

UUD 45 : Undang Undang Dasar 1945

UNWGEID : United Nations Working Group on Involuntary Disappearances

UPR : Universal Periodic Review

UNPAS : Universitas Pasundan

UPI : Universitas Pendidikan Indonesia

UNPAD : Universitas Padjajaran

UNSUAGATI : Universitas Sunan Gunung Jati

UIN : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

UHAMKA : Universitas Hamka

UI : Universitas Indonesia

UKI : Universitas Kristen Indonesia

UPF : Unidade Policia de Frontera

UNTAET : United Nations Transitional Administration in East Timor

V

W

Walhi : Wahana Lingkungan Hidup

X

Y

YLBHI : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Z